



**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	27
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah	30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	47
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	55
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	55
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	56
3.3. Program dan Kegiatan	57
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	78
BAB V. PENUTUP	93

DAFTAR TABEL

Tabel T-C-29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)	16
Tabel T-C-30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Makassar Tahun 2020	26
Tabel T-C-31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kota Makassar	31
Tabel T-C-32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kota Makassar	47
Tabel 3.1	Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Kabupaten/Kota Makassar	55
Tabel T-C-33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2010 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar	64
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan, yang diimplementasikan dalam penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sementara itu sekaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, setiap SKPD diwajibkan menyusun dan memiliki dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dengan jenjang perencanaan lima tahun, yang disusun dengan berpedoman dan mengacu kepada RKPD, dan setiap SKPD juga diwajibkan menyusun dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD dengan jenjang perencanaan satu tahun.

Sehubungan hal diatas, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) juga berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dengan adanya keterkaitan antara dokumen penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai pada penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD, sehingga tersusun dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD sebagai implementasi teknis program dan kegiatan dari Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, dimana hal ini bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar juga menyusun Rencana Kerja Tahun 2021, yang merupakan dokumen rencana Kerja dengan jenjang perencanaan satu tahun guna menjalankan RKPD yang disertai

dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang telah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini beberapa acuan yang digunakan untuk memberikan batasan dan ruang lingkup yang berkaitan dengan rencana kerja itu sendiri, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan kemudian diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017);
19. Peraturan Walikota Makassar Nomor 97 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 97);
20. Peraturan Walikota Makassar Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2020;

1.3. Maksud dan Tujuan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar menyusun Rencana Kerja Tahunan untuk tahun 2021, dengan memperhatikan maksud dan tujuan didirikannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar sebagai organisasi perangkat daerah di kota Makassar.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar tahun 2021 ini adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu

satu tahun yang berisi program-program prioritas yang akan dilaksanakan dan sebagai gambaran capaian kinerja yang dapat ditransformasikan kedalam rencana Kerja Anggaran SKPD. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2019.

1. Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar ini adalah tersedianya dokumen perencanaan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik selama setahun.
2. Tujuan :
 - a. Tersedianya suatu dokumen rencana kerja dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi pencapaian tujuan Pembangunan Daerah tahun 2021.
 - b. Tersedianya perencanaan yang terarah, terpadu, sinergis dan berkesinambungan terhadap kebijakan dan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - c. Tersedianya pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
 - d. Menjadi acuan, jaminan dan keterkaitan dalam perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang yang berisi maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2021.

I.2. Landasan Hukum

Menjelaskan tentang dasar hukum penyusunan dokumen perencanaan.

I.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2021.

I.4 Sistematika Penulisan

Memuat sistematika Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2021.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Hasil Evaluasi Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang hasil pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan yang mengacu pada APBD tahun berjalan, serta kaitannya dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, Standar Prosedur dan Kriteria) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal), maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci).

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

II.4 Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan sekaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah

II.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan tentang hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan tentang penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

III.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

III.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan tentang faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisikan uraian kesimpulan, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pada Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, telah ditetapkan perencanaan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yang mencakup 89 (delapan) program dan 30 (tiga puluh) kegiatan, terdiri dari 4 (empat) program penunjang/pendukung, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 4 (empat) program utama, 11 (sebelas) kegiatan dengan total realisasi anggaran sampai triwulan II adalah sebesar Rp. 3.548.739.100,- (Tiga Milyard Lima Ratus Empat Puluh Delapan Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah). Secara umum program dan kegiatan tersebut telah berhasil diselenggarakan dengan baik tanpa hambatan. Keberhasilan ini dapat dilihat berdasarkan pencapaian indikator kinerja setiap kegiatan maupun pencapaian indikator kinerja utama serta berdasarkan persentase penyerapan anggaran.

Realisasi capaian target kinerja 4 (empat) program utama adalah sebagai berikut :

a. Program Utama

1. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Realisasi kinerja Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan indikator Persentase organisasi kemasyarakatan / politik mitra yang aktif, terdaftar dan telah mendapatkan pembinaan dalam penguatan kesatuan bangsa, adalah sebesar 25 Ormas/LSM/Yayasan/Orpol atau 25% dari target sebesar 544 Ormas/LSM/Yayasan/Orpol atau 100%. Tingkat capaian kinerja sebesar 25% jika dibandingkan dengan target tahun 2020. Atau 40 % apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan).

➤ Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

1. Adanya kekompakan dan motivasi kerja aparatur lingkup Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diberikan
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bekerjasama melakukan koordinasi secara rutin dan berkala dengan LSM/Ormas dan Partai Politik dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut.

3. Tingginya antusiasme pengurus LSM/Ormas dan Partai Politik dalam menindaklanjuti hasil kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Makassar

➤ **Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :**

1. Kelembagaan demokrasi yang masih belum terlalu kokoh.
2. Penyelenggaraan pemilihan umum masih menyisakan berbagai persoalan, terutama mengenai daftar pemilih tetap dan penetapan hasil pemilihan umum.
3. Belum optimalnya kapasitas organisasi partai politik dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Hal itu ditandai oleh relatif kurang berperannya kelembagaan politik dalam melaksanakan fungsi-fungsi artikulasi kepentingan masyarakat maupun dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.
4. Masih kurangnya pemahaman pengurus ormas/orpol tentang penetapan aturan dan landasan hukum yang baru kepada organisasi di daerah khususnya pada proses pendaftaran organisasi di pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yakni permendagri No.33 Tahun 2012 tentang pedoman pendaftaran organisasi kemasyarakatan lingkup Kementerian Dalam Negeri maupun pemerintah Daerah.
5. Kurang lengkapnya alamat detail sekretariat organisasi yang akan diverifikasi oleh tim verifikator dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, sehingga lokasi atau sekretariat yang ada pada dokumen pemberkasan ormas/orpol tersebut tidak jelas dan tidak ditemukan.
6. Kurangnya aturan yang memuat sanksi administrasi kepada ormas/orpol yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai ormas/orpol.
7. Masih rendahnya kualitas pengurus dan anggota ormas/orpol dalam menjalankan organisasinya termasuk administrasi yang ada pada ormas/orpol tersebut.

2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial

Realisasi kinerja Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Sosial dengan indikator Persentase jumlah konflik dan gangguan keamanan horizontal yang tertangani adalah sebesar 0% dari target sebesar 90%. Tingkat capaian kinerja sebesar 0% jika dibandingkan dengan target tahun 2019. Atau 55% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan).

➤ **Faktor pendorong keberhasilan kinerja :**

1. Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan dengan baik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yang bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dengan tidak terpengaruh dengan provokasi-provokasi yang menimbulkan konflik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, agar tercipta suasana kondusif di Kota Makassar
2. Para tokoh masyarakat, senantiasa memberikan arahan/musyawarah dan pemantauan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dan terprovokasi terhadap isu-isu yang menimbulkan konflik baik kepada kelompok-kelompok tertentu, sehingga tercipta suasana kondusif di Kota Makassar.
3. Penegakan sanksi dan hukum terhadap oknum yang terbukti melaksanakan provokasi atau tindakan-tindakan yang memicu konflik dan mengganggu kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya dalam wilayah Kota Makassar.

➤ **Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :**

1. Masih adanya gejala terorisme dan berbagai bentuk tindakan melawan hukum lainnya serta gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Selain itu, dalam hubungan antar kelompok masyarakat, masih ditemukan adanya insiden-insiden kekerasan yang melanggar hukum diantara sebagian kelompok masyarakat.
2. Masih adanya potensi terjadinya perang kelompok
3. Masih adanya potensi tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh sekelompok geng motor.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Realisasi kinerja Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan indikator Persentase jumlah konflik umat beragama dan etnis yang tertangani adalah sebesar 0% (tidak terjadi konflik umat beragama dan etnis selama triwulan II) dari target sebesar 90%. Tingkat capaian kinerja sebesar 0% jika dibandingkan dengan target tahun 2019. Atau 0% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan).

➤ **Faktor pendorong keberhasilan kinerja :**

1. Terlaksananya sosialisasi yang melibatkan tokoh etnis, organisasi daerah, sehingga mampu meminimalisir terjadinya konflik antar asrama/mahasiswa antar daerah.
2. Dengan terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar bekerjasama dan berkoordinasi secara rutin dan berkala dengan para pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), untuk melakukan kunjungan ke setiap kecamatan/kelurahan dan bertemu Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat serta masyarakat pada umumnya dengan tujuan agar masyarakat juga tahu setiap akar munculnya masalah/konflik yang akan terjadi sehingga dapat dilakukan deteksi dini sebagai pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap ancaman yang mungkin timbul khususnya di Kota Makassar.
3. Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan dengan baik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yang bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menjaga toleransi antar umat beragama dengan tidak terpengaruh dengan provokasi-provokasi yang menimbulkan konflik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, agar tercipta suasana kondusif di kota Makassar
4. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus etnis dan komunitas etnis yang senantiasa memberikan arahan/musyawarah dan pemantauan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dan terprovokasi terhadap isu-isu yang

menimbulkan konflik baik kepada kelompok-kelompok tertentu, pemeluk agama dan etnis/kelompok suku lainnya, sehingga tercipta suasana kondusif di Kota Makassar.

5. Penegakan sanksi dan hukum terhadap oknum yang terbukti melaksanakan provokasi atau tindakan-tindakan yang memicu konflik dan mengganggu kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya dalam wilayah Kota Makassar

➤ **Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :**

1. Belum meratanya keterlibatan RT/RW sebagai peserta kegiatan sosialisasi, yang disebabkan karena minimnya data RT/RW terpilih, dan ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam menunjang pelaksanaan setiap kegiatan-kegiatan sosialisasi yang kami laksanakan.
2. Belum meratanya keterlibatan Mahasiswa khususnya mahasiswa yang berasal dari luar Kota Makassar, sebagai peserta kegiatan sosialisasi, yang disebabkan karena minimnya data asrama mahasiswa daerah. Bahkan ada beberapa asrama mahasiswa yang sudah tidak dihuni (kosong). ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam menunjang pelaksanaan setiap kegiatan-kegiatan sosialisasi yang kami laksanakan
3. Perlunya penguatan integrasi dan intergritas bangsa.
4. Masih adanya penggunaan cara-cara penyampaian pendapat yang mengabaikan/melecehkan simbol-simbol negara, bahkan ada yang cenderung anarkis dan masih adanya kecenderungan lebih mementingkan kepentingan kelompok dari pada kepentingan umum.

3. Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

- ❖ Realisasi kinerja Program pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan indikator Menekan persentase Pengguna Narkotika 1,6% pertahun dari jumlah penduduk Kota Makassar adalah sebesar 0% dari target sebesar 1,6%. Tingkat capaian kinerja sebesar 0% jika dibandingkan dengan target tahun 2019. Atau 215 % apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan).

➤ **Faktor pendorong keberhasilan kinerja :**

1. Terlaksananya sosialisasi dengan baik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yang bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya memberantas narkoba agar peredaran narkoba dapat diminimalisir khususnya di Kota Makassar
2. Penegakan sanksi dan hukum terhadap orang yang terbukti mengedar, dan menggunakan narkoba
3. Adanya koordinasi seluruh stakeholders dalam memberantas penggunaan narkoba dan obat terlarang lainnya

➤ **Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja**

- Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang dampak buruk dari narkoba dan zat adiktif lainnya, sehingga kurang terlibat dalam memberantas narkoba.

❖ Realisasi kinerja Program pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan indikator Jumlah sample yang diperiksa dan dideteksi dini adalah sebesar 0. Tingkat capaian kinerja sebesar 0% jika dibandingkan dengan target tahun 2019. Atau 25 % apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan).

➤ **Faktor pendorong keberhasilan kinerja :**

1. Terlaksananya sosialisasi dengan baik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yang bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya memberantas narkoba agar peredaran narkoba dapat diminimalisir khususnya di Kota Makassar
2. Penegakan sanksi dan hukum terhadap orang yang terbukti mengedar, dan menggunakan narkoba
3. Adanya koordinasi seluruh stakeholders dalam memberantas penggunaan narkoba dan obat terlarang lainnya

➤ **Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja**

- Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang dampak buruk dari narkoba dan zat adiktif lainnya, sehingga kurang terlibat dalam memberantas narkoba.
- ❖ Realisasi kinerja Program pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan indikator Persentase Ketersediaan Data Pengguna, Pengedar dan Bandar Narkoba adalah sebesar 0%. Tingkat capaian kinerja sebesar 0% jika dibandingkan dengan target tahun 2019. Atau 0 % apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan).

b. Program Penunjang/Pendukung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah sebesar 53 %. Tingkat capaian kinerja sebesar 53% Jika dibandingkan dengan target tahun 2019. Atau 153% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan).

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Realisasi kinerja Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dengan indikator Persentase pemenuhan sarana dan prasarana adalah sebesar 25 %. Tingkat capaian kinerja adalah sebesar 25% Jika dibandingkan dengan target tahun 2019. Atau 125% apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan).

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Realisasi kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan indikator Cakupan aparatur yang mendapatkan pelatihan kompeten dibidangnya adalah sebesar 300 orang. Tingkat capaian kinerja sebesar 60% Jika dibandingkan dengan target tahun 2019. Atau 151 % apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan).

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Realisasi kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan dengan indikator Persentase capaian kinerja yang termuat dalam

citizen's charter SKPD adalah sebesar 50 %. Tingkat capaian kinerja sebesar 50% Jika dibandingkan dengan target tahun 2019. Atau 150 % apabila dibandingkan dengan target Renstra (5 tahunan).

(Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2020 (Tahun Berjalan)**

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018 (TAHUN N-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) 2019			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 (N-1))	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN			
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 (TAHUN N-2)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 (TAHUN N-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2020 (N-1))	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
4	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
4	01	Kesatuan Bangsa dan Politik										
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
4	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100	%	0%	
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	100%	6	Orang	0%
		04	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penerima jasa kebersihan kantor	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	2	Orang	0%
		05	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis lainnya	Jumlah penerima jasa pendukung administrasi kantor/teknis lainnya	36 Orang	88 Orang	36 Orang	36 Orang	100%	36	Orang	0%

			06	Penyediaan bahan bacaan	Jumlah bahan bacaan dan per undang undangan yang tersedia	3	Media cetak	3	Media cetak	3	Media cetak	3	Media cetak	100%	3	Media cetak	0%
			09	Pengelolaan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya barang ATK	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	0%
			10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase kegiatan rapat-rapat koordinasi yang terlaksana	100	%	100	%	100	%	100	%	100%	100	%	0%
			48	Sosialisasi kinerja pelayanan publik	Tercapainya kinerja dan pelayanan publik	1	SKPD	1	SKPD	1	SKPD	1	SKPD	100%	1	SKPD	0%
			53	Penyediaan jasa jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah jasa jaminan sosial ketenagakerjaan	36	Orang	36	Orang	36	Orang	36	Orang	100%	36	Orang	0%
4	01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	%	65	%	100	%	100	%	100%	100	%	0%
			14	Pengadaan Alat Kantor	Jumlah alat kantor yang diadakan	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	100%	3	Jenis	0%
			15	Pengadaan alat rumah tangga	Jumlah perlengkapan rumah tangga yang tersedia	3	Jenis	7	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	100%	3	Jenis	0%
			16	Pengadaan komputer	Jumlah komputer yang tersedia	2	jenis	5	jenis	2	jenis	2	jenis	100%	2	jenis	0%
			18	Pengadaan Alat Studio	Jumlah alat studio yang diadakan			2	Jenis			0	Jenis			Jenis	0%
			34	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan/mobil jabatan yang siap pakai	1	Unit Kendaraan	1	Unit Kendaraan	1	Unit Kendaraan	1	Unit Kendaraan	100%	1	Unit Kendaraan	0%
			35	Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang siap pakai	27	Unit Kendaraan	27	Unit Kendaraan	27	Unit Kendaraan	27	Unit Kendaraan	100%	27	Unit Kendaraan	0%
			46	Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang siap pakai	20	unit	10	unit	20	unit	20	unit	100%	20	unit	0%
			47	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang siap pakai	36	Unit	36	Unit	36	Unit	36	Unit	100%	36	Unit	0%
			67	Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan pajaknya	28	Unit Kendaraan	28	Unit Kendaraan	28	Unit Kendaraan	9	Unit Kendaraan	32%	28	Unit Kendaraan	0%
			68	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik yang berfungsi dengan baik	2	jenis	2	jenis	2	jenis	2	jenis	100%	2	jenis	0%

			bangunan kantor										
		74	Pengadaan aplikasi sistem informasi manajemen (SIM)	Jumlah aplikasi sistem informasi manajemen (SIM) yang tersedia		1 paket			0 paket	0%		paket	0%
		75	Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi sistem informasi manajemen (SIM)	Jumlah aplikasi sistem informasi manajemen (SIM) yang terpelihara			1 Aplikasi		0 paket	0%		paket	0%
4	01	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Prensentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Disiplin bagi aparatur	100 %	100 %	100 %		95 %	95%	100	%	0%
				Persentase ketersediaan pakaian dinas pegawai	100 %		100 %		100 %	100%	100	%	
		01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	63 Orang/Stell	63 Orang/Stell	63 Orang/Stell		63 Orang/Stell	100%	63	Orang/Stell	0%
4	01	04	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan Aparatur yang mendapatkan Pelatihan Kompeten di bidangnya	4 Orang	10 Orang	4 Orang		4 Orang	100%	4	Orang	0%
		01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah org yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	4 Orang	10 Orang	4 Orang		4 Orang	100%	4	Orang	0%
4	01	05	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase capaian kinerja yang termuat dalam perjanjian kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	100 %		100 %	100%	100	%	0%
		01	Penyusunan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan 2017 dan RKA Pokok 2018	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	100%	2	Dokumen	0%
		02	Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA Perubahan 2017 dan DPA Pokok 2018	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	100%	2	Dokumen	0%
		03	Penyusunan RENJA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja OPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	100%	1	Dokumen	0%
		04	Penyusunan LAKIP-SKPD	Jumlah LAKIP OPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	100%	1	Dokumen	0%
		05	Penyusunan Perjanjian Kinerja	Jumlah dokumen TAPKIN yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	100%	1	dokumen	0%

			06	Penyusunan RENSTRA-SKPD	Tersusunnya dokumen Renstra OPD	1 Dokumen	1 Dokumen		0 Dokumen	0%	1	Dokumen	0%
			07	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun serta Perhitungan Penyusutan Aset SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1	dokumen	0%
			08	Pengelolaan keuangan SKPD	Jumlah kegiatan pengelolaan keuangan OPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12	bulan	0%
			09	Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi	Jumlah jasa kinerja pelayanan dan administrasi	3 Orang	42 Orang	3 Orang	1 Orang	33%	3	Orang	0%
			12	Monitoring evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban penerima hibah dan bantuan sosial	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban hibah dan bansos	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	200%	1	dokumen	0%
4	01	09		Program pendidikan politik masyarakat	% Organisasi kemasyarakatan/politik mitra yang aktif terdaftar dan telah mendapatkan pembinaan dalam penguatan wawasan kesatuan bangsa	100 %	14,81 %	79,24 %	97,72 %	123,32%	100	%	0,00%
						544 Jumlah Organisasi	48 Jumlah Organisasi	439 Jumlah Organisasi	429 Jumlah Organisasi	97,72%	544	Jumlah Organisasi	0,00%
			01	Sosialisasi pendidikan politik bagi tokoh masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi Pendidikan Politik bagi tokoh masyarakat	800 Orang	800 Orang	800 Orang	800 Orang	100%	800	Orang	0%
			02	Pendidikan politik bagi pemilih muda	Jumlah peserta pemilih muda yang mendapat pendidikan politik	200 Orang	800 Orang	200 Orang	200 Orang	100%	200	Orang	0%
			03	Sosialisasi pengajuan/pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol	Jumlah peserta Sosialisasi pegajuan / pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	100%	200	orang	0%
			04	Forum dialog politik pemuda	Jumlah peserta Forum Dialog Politik Pemuda	200 orang	300 orang	200 orang	200 orang	100%	200	orang	0%

			05	Sosialisasi Hubungan Kelembagaan antar Kelurahan/Kecamatan	Jumlah peserta Sosialisasi Hubungan Kelembagaan antar Kelurahan/Kecamatan	200 orang	300 orang	200 orang	200 orang	100%	200 orang	0%
			06	Pos Koordinasi antara Pemerintah Kota dan Instansi terkait dalam Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada (komunikasi pada sektor sosialisasi pemilu/pemilukada dengan instansi terkait)	Jumlah rekomendasi hasil Koordinasi antara Pemerintah Kota dan Instansi terkait dalam Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada	20 rekomendasi			0	0%	20	0%
			07	Monitoring Hubungan Kelembagaan Kelurahan/Kecamatan	Jumlah rekomendasi hasil monitoring Hubungan Kelembagaan Kelurahan/Kecamatan	20 rekomendasi	6 kegiatan	20 rekomendasi	20 kegiatan	100%	20 kegiatan	0%
			08	Verifikasi kelengkapan pengajuan bantuan partai politik	Jumlah rekomendasi hasil verifikasi kelengkapan pengajuan bantuan partai politik	20 rekomendasi	12 kegiatan	20 rekomendasi	20 kegiatan	100%	20 kegiatan	0%
			09	Sosialisasi undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan	Jumlah peserta Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi Kemasyarakatan	200 orang	200 orang	200 orang	200 orang	100%	200 orang	0%
			10	Verifikasi dan administrasi izin penelitian dan pendaftaran ormas	Jumlah rekomendasi izin penelitian dan pendaftaran Ormas yang dikeluarkan	200 rekomendasi	12 kegiatan	2000 rekomendasi	2000 kegiatan	100%	2000 kegiatan	0%
			11	Pemantauan keberadaan Ormas/LSM	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan Ormas/LSM	20 rekomendasi	12 kegiatan	20 rekomendasi	20 kegiatan	100%	20 kegiatan	0%
			12	Jambore organisasi masyarakat tingkat kota Makassar	Jumlah peserta Jambore organisasi Masyarakat tingkat Kota Makassar	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	0%
			13	Sosialisasi pendidikan politik penguatan kesatuan bangsa bagi organisasi politik organisasi Masyarakat	Jumlah peserta Sosialisasi pendidikan politik penguatan kesatuan bangsa bagi organisasi Politik,	200 Orang	800 Orang	200 Orang	200 Orang	100%	200 Orang	0%

				organisasi Masyarakat dan LSM								
			14	Sosialisasi nilai-nilai pendidikan politik terhadap penguatan kesatuan bangsa untuk organisasi polit	Jumlah peserta Sosialisasi nilai-nilai pendidikan politik terhadap penguatan kesatuan bangsa untuk organisasi Politik, organisasi Masyarakat dan LSM	200 orang		200 orang	200 orang	100%	200 orang	0%
			15	Pemantauan persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkukada	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan pemilu dan pilukada	20 rekomendasi		20 rekomendasi	20 rekomendasi	100%	20 rekomendasi	0%
			17	Sosialisasi Undang Undang Nomor 7 tentang Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah peserta Sosialisasi Undang Undang Nomor 7 tentang Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik	200 orang		200 orang	0 orang	0%	200 orang	0%
			18	Bimtek Orientasi Tahapan Pemilu bagi tokoh masyarakat, RT/RW se Kota Makassar	Jumlah peserta Bimtek Orientasi Tahapan Pemilu bagi tokoh masyarakat, RT/RW se Kota Makassar	1000 Orang		1000 Orang	1500 orang	150%	1000 orang	0%
			19	Desk Pilkada Serentak	Jumlah kegiatan Desk Pilkada serentak	9 kegiatan		9 kegiatan	9 kegiatan	100%	9 kegiatan	0%
			20	Satuan Tugas Peningkatan Partisipasi Pemilih & Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak	Jumlah kegiatan peningkatan partisipasi pemilu yang terlaksana	9 kegiatan		9 kegiatan	9 kegiatan	100%	9 kegiatan	0%
			21	Rapat kordinasi teknis penyelenggaraan pemilu serentak bagi unsur kecamatan / kelurahan, LPM, RT/RW Kota Makassar	Jumlah peserta Rapat kordinasi teknis penyelenggaraan pemilu serentak bagi unsur kecamatan / kelurahan, LPM, RT/RW Kota Makassar	800 Orang		800 Orang	800 orang	100%	800 orang	0%
4	01	05		Program peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial ekonomi	% Jumlah konflik dan gangguan keamanan horizontal yang tertangani	95 %	100 %	90 %	100 %	111%	95 %	0%
			01	Sosialisasi pengendalian keamanan dan	Jumlah Peserta Sosialisasi	700 orang	100 orang	700 orang	700 orang	100%	700 orang	0%

			kenyamanan lingkungan	pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan								
		02	Sosialisasi pencegahan aksi geng motor lingkup kota Makassar	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan aksi geng motor lingkup Kota Makassar	100 orang	200 orang	100 orang	100 orang	100%	100	orang	0%
		03	Sosialisasi kewaspadaan dini potensi konflik	Jumlah Peserta Sosialisasi Kewaspadaan Dini Potensi Konflik	100 orang	200 orang	100 orang	100 orang	100%	100	orang	0%
		04	Bimtek Resolusi konflik	Jumlah Peserta Bimtek Resolusi Konflik	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	100	orang	0%
		05	Sosialisasi Rekonsiliasi konflik	Jumlah Peserta Sosialisasi Rekonsiliasi Konflik	100 orang	200 orang	100 orang	100 orang	100%	100	orang	0%
		06	Pengendali Kegiatan Unjuk Rasa	Jumlah pengendali unjuk rasa yang dilaksanakan	100 kegiatan	12 kegiatan	100 kegiatan	100 kegiatan	100%	100	kegiatan	0%
		07	Dewan penasehat dan keanggotaan forum kewaspadaan dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi forum kewaspadaan dini masyarakat	20 rekomendasi	12 kegiatan	20 rekomendasi	20 kegiatan	100%	20	kegiatan	0%
		09	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi penanganan konflik sosial	20 rekomendasi	12 triwulan	20 rekomendasi	20 triwulan	100%	20	triwulan	0%
		10	Pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat (KOMINDA)	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Pembinaan dan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (KOMINDA)	20 rekomendasi	12 kegiatan	20 rekomendasi	20 kegiatan	100%	20	kegiatan	0%
		11	Pengawasan dan Identifikasi Orang Asing (POA)	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Pengawasan dan Identifikasi org Asing (POA)	20 rekomendasi	12 kegiatan	20 rekomendasi	20 kegiatan	100%	20	kegiatan	0%
		12	Sosialisasi pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras bagi masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras bagi masyarakat	100 orang	400 orang	100 orang	100 orang	100%	100	orang	0%

			13	Sosialisasi optimalisasi ketahanan sosial ekonomi bagi aparat yang membidangi ketahanan sosial ekonomi	Jumlah Peserta Sosialisasi Optimalisasi Ketahanan Sosial Ekonomi bagi Aparat yang membidangi Ketahanan Sosial Ekonomi Tingkat Kota Makassar	100 orang	300 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	0%
4	01	05		Program pengembangan wawasan kebangsaan	% Jumlah Konflik antar umat beragama dan etnis yang tertangani	95 %	80 %	90 %	100 %	111%	95 %	0%
			01	Sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Peserta Sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	100 orang	600 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	0%
			02	Sosialisasi peningkatan toleransi antar budaya suku dan etnis	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Toleransi antar Budaya, Suku dan Etnis	100 orang	600 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	0%
			03	Pemantauan dan verifikasi rencana pendirian rumah ibadah	Jumlah rekomendasi hasil Pemantauan dan Verifikasi Rencana Pendirian Rumah Ibadah	20 rekomendasi	12 kegiatan	20 rekomendasi	20 kegiatan	100%	20 kegiatan	0%
			04	Sosialisasi forum pembauran kebangsaan kota Makassar	Jumlah Peserta Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan Kota Makassar	100 orang	700 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	0%
			05	Sosialisasi peningkatan peran tokoh etnis dalam rangka menciptakan situasi kondusif	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Peran Tokoh Etnis dalam rangka menciptakan situasi kondusif	100 orang	700 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	0%
			06	Sosialisasi peningkatan kesadaran bela negara bagi generasi muda	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara bagi Generasi Muda	100 orang	700 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	0%
			07	Forum dialog peningkatan peran tokoh agama dalam memperkuat kerukunan hidup umat beragama	Jumlah Peserta Forum Dialog peningkatan peran tokoh agama dalam meperkuat kerukunan hidup umat	100 orang	600 orang	200 orang	200 orang	100%	100 orang	0%

					beragama								
			08	Wawasan kebangsaan kota Makassar	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi wawasan kebangsaan Kota Makassar	20 rekomendasi	6 kegiatan	20 rekomendasi	20 kegiatan	100%	20	kegiatan	0%
			09	Forum pembauran kebangsaan (FPK)	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	20 rekomendasi	12 kegiatan	20 rekomendasi	20 kegiatan	100%	20	kegiatan	0%
			10	Forum kerukunan umat beragama	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	20 rekomendasi	12 kegiatan	20 rekomendasi	20 kegiatan	100%	20	kegiatan	0%
4	01	12		Program pencegahan penyalahgunaan narkotika	Menekan % Pengguna Narkotika 1,6%	1,5 %	3,23 %	1,6 %	1,25 %	78%	2	%	0%
					Jumlah sample yang diperiksa dan dideteksi dini	300 sampel	750 sampel	2800 sampel	701 sampel	25%	3000	sampel	0%
					Persentase Ketersediaan Data Pengguna, Pengedar dan Bandar Narkotika	100 %		100 %	100 %	100%	100	%	0%
			01	Penyuluhan Bahaya Narkotika	Jumlah Siswa/i SD, SMP dan SMA/Sederajat yang Mengikuti Penyuluhan	875 orang	250 Peserta	875 Peserta	875 Peserta	100%	875	Peserta	0%
			02	Penyuluhan Bahaya Narkotika Bagi Masyarakat Lorong	Jumlah Peserta Penyuluhan Bahaya Narkotika Bagi Masyarakat Lorong	200 Orang	1500 Orang	200 Orang	200 Orang	100%	200	Orang	0%
			02	Kampanye Bulan Anti Narkotika	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Kampanye Bulan Anti Narkotika	1 kali kampanye bulan anti narkotika	1 kali kampanye bulan anti narkotika	1 kali kampanye bulan anti narkotika	0 kali kampanye bulan anti narkotika	0%	1	kali kampanye bulan anti narkotika	0%
			03	Pelatihan Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkotika	Jumlah Tenaga Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkotika	100 orang	160 peserta	200 peserta	200 peserta	100%	100	peserta	0%
			05	Pendataan dan penyajian data pengguna narkotika	Jumlah kegiatan pendataan yang dilaksanakan	6 kali pendataan		4 kali	4 kegiatan	100%	6	kegiatan	0%

			06	Koordinasi Penanggulangan Bahaya Narkoba	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi penanggulangan bahaya narkoba	20 rekomendasi		20 rekomendasi	20 rekomendasi	100%	20	rekomendasi	0%
			07	Pemeriksaan dan deteksi dini pengguna narkoba	Jumlah sample yang diperiksa dan dideteksi dini	2700 sampel		750 sampel	750 sampel	100%	2700	sampel	0%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Masukkan Narasi analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar
Untuk Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Target Renstra SKPD (Tahun 2020,2021,2022)			Realisasi Capaian Renja Triwulan I	Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	9	10	10	11	13	14	16
1	Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi dan SDM terhadap Tupoksi Instansi	100%	100%	100%	17%	-	-	Program Pendukung
2	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	0%	-	-	Program Pendukung
3	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	0%	-	-	Program Pendukung
4	Meningkatnya kualitas SDM aparatur sesuai bidangnya	4 orang	4 orang	4 orang	0	-	-	Program Pendukung
5	Tercapainya pelaporan kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	3%	-	-	Program Pendukung
6	Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah dan kemitraan penguatan kesatuan bangsa	79,24 % (439) Organisasi	100,00 % (544) Organisasi	100,00 % (544) Organisasi	0 % (0) Organisasi	-	-	Program Prioritas
7	Menurunnya jumlah konflik dan gangguan keamanan horizontal	90%	95%	95%	0%	-	-	Program Prioritas
8	Menurunnya jumlah konflik umat beragama dan etnis	90%	95%	95%	0%	-	-	Program Prioritas
9	Menekan persentase pengguna narkoba 1,9% pertahun dari jumlah penduduk Kota Makassar	1,6% dari Jumlah penduduk Kota Makassar	1,5% dari Jumlah penduduk Kota Makassar	1,5% dari Jumlah penduduk Kota Makassar	0%	-	-	Program Prioritas
10	Jumlah sample yang diperiksa dan dideteksi dini	2.800 Sampel	3000 Sampel	3000 Sampel	0	-	-	Program Prioritas
11	Persentase Ketersediaan Data Pengguna, Pengedar dan Bandar Narkoba	100%	100%	100%	0	-	-	Program Prioritas

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Adapun isu-isu strategis dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Aksi Terorisme, Aksi-aksi kekerasan terorisme merupakan masalah serius yang dihadapi oleh negara di dunia khususnya Indonesia. Munculnya aksi ini disebabkan karena adanya perbedaan ideologi dan doktrin yang dilakukan oleh salah satu aliran radikal, untuk merekrut masyarakat agar bergabung kedalam jaringannya. Oleh karena itu perlu penanganan serius dalam menghadapi masalah ini, karena menjadi ancaman dan tantangan terbesar bagi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia di masa mendatang.
2. Masalah kejahatan yang berbentuk kejahatan trans nasional seperti penyelundupan, perdagangan narkoba, perdagangan manusia juga merupakan ancaman serius bagi negara seperti Indonesia yang memiliki posisi geografis yang strategis bagi suburnya pertumbuhan jenis-jenis kejahatan lintas batas tersebut. Karena itu, sebagai negara asal maupun transit bagi operasi tindak kejahatan trans nasional, Indonesia khususnya Kota Makassar dituntut untuk terus meningkatkan upaya-upaya dalam menekan kejahatan lintas batas tersebut melalui suatu format kerjasama dengan daerah lainnya secara komprehensif.
3. Pengangguran, Munculnya pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah, besarnya angka pengangguran tidak seimbang dengan kesempatan kerja dimana ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah pengangguran lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia, struktur lapangan kerja tidak seimbang. Pengangguran ini juga merupakan hal yang sangat penting untuk diantisipasi, karena bisa memacu orang mencari jalan lain untuk mendapatkan uang, salah satunya dengan melakukan tindakan begal.
4. Kemiskinan, Munculnya kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah, kurangnya kesempatan kerja, minimnya kualitas SDM yang disebabkan karena rendahnya tingkat dan jenis pendidikan. Kemiskinan ini juga merupakan hal yang sangat penting untuk diantisipasi, karena bisa memacu orang mencari jalan lain untuk mendapatkan uang, salah satunya dengan melakukan tindakan kriminal.
5. Aksi begal yang disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Maraknya budaya konsumerisme dan materialisme.
 - b. Adanya pengaruh tonotonan media yang menampilkan adegan kekerasan secara vulgar yang seolah mengajari penontonnya untuk bisa melakukan aksi begal.
 - c. Lemahnya pengawasan sosial.
 - d. Kondisi perekonomian negara kita masih belum cukup baik. Saat harga kebutuhan pokok meningkat, berbanding terbalik dengan penghasilan.
 - e. Terbatasnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat kelas bawah bisa memacu orang mencari jalan lain untuk mendapatkan uang, salah satunya membegal.
6. Perkembangan demokrasi, rendahnya pengetahuan masyarakat dalam berdemokrasi, rentan dengan munculnya konflik antar suku dan golongan, hal ini juga merupakan hal serius yang perlu ditangani kedepan.
 7. Penyelenggaraan pemilihan umum masih menyisakan berbagai persoalan, terutama mengenai daftar pemilih tetap dan penetapan hasil pemilihan umum.
 8. Aspek sosial budaya dimana merupakan salah satu aspek yang mempunyai tantangan yang berat. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Kota Makassar sebagai ibukota provinsi yang didiami oleh 3 (tiga) suku bangsa yang ada di Sulawesi Selatan yakni, Bugis, Makassar, dan Toraja ditambah dengan suku-suku lain dari luar Sulawesi Selatan. Kesemua suku bangsa ini, baik suku bangsa yang ada di Sulawesi Selatan maupun suku bangsa diluar Sulawesi Selatan memiliki latar belakang, adat istiadat (budaya) yang tidak sama ditambah lagi latar belakang ekonomi dan sosial lainnya yang tidak sama, salah satu permasalahan dari aspek sosial budaya adalah masalahkesenjangan yang setiap saat dapat menimbulkan kriminalitas diantarra perang kelompok, geng motor perelisihan antar etnis, dan antar agama. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar untuk menciptakan atau mewujudkan keadaan yang kondusif bagi masyarakat Kota Makassar.
 9. Aspek penguatan integrasi. Sebagai bangsa yang pluralis, kemajemukan suku, ras, agama dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus diterima dan dihormati. Pengelolaan kemajemukan bangsa secara baik merupakan tantangan dalam mempertahankan integrasi dan intergritas bangsa.

10. Masih adanya penggunaan cara-cara penyampaian pendapat yang mengabaikan/melecehkan simbol-simbol negara, bahkan ada yang cenderung anarkis dan masih adanya kecenderungan lebih mementingkan kepentingan kelompok dari pada kepentingan umum.
11. Masih adanya potensi konflik vertikal, konflik horizontal yang bernuansa SARA, dan konflik politik. Selain itu, masih terdapat gejala politisasi nilai-nilai agama dan kepercayaan sebagai bagian dari pertentangan kepentingan politik dan kekuasaan selama beberapa tahun terakhir.

Hal inilah yang merupakan isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian, dan jika tidak diantisipasi saat ini akan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar kedepan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, menetapkan prioritas pembangunan pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel T-C.3.1

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021

Kota Makassar

Nama SKPD : Badan Kesbangpol Kota Makassar

N O	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	CATATA N PENTIN G
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					10.374.916.900					10.374.916.900	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Makassar	Indek kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	90%	7.609.024.900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Makassar	Indek kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	90%	7.609.024.900	
		Makassar	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%			Makassar	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%		
		Makassar	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%			Makassar	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%		

		Makassar	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%			Makassar	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%		
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	5 Dokumen	112.500.000		Makassar	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	5 Dokumen	112.500.000	
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Makassar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	37.500.000		Makassar	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	37.500.000	
	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Makassar	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	75.000.000		Makassar	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun	2 dokumen	75.000.000	
	Administrasi Keuangan	Makassar	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	5 Dokumen	4.128.131.250		Makassar	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	5 Dokumen	4.128.131.250	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Makassar	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	22 orang	3.301.128.000		Makassar	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	22 orang	3.301.128.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Makassar	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	41 orang	714.503.250		Makassar	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	41 orang	714.503.250	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	2 dokumen	75.000.000		Makassar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	2 dokumen	75.000.000	
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	2 dokumen	37.500.000		Makassar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	2 dokumen	37.500.000	
	Administrasi Umum	Makassar	Jumlah jasa adminitrasi umum yang tersedia	5 jenis	1.910.526.375		Makassar	Jumlah jasa adminitrasi umum yang tersedia	5 jenis	1.910.526.375	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Jumlah Jasa Surat Menyurat dan ekspedisi yang disediakan	6 orang	36.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Makassar	Jumlah Jasa Surat Menyurat dan ekspedisi yang disediakan	6 orang	36.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Makassar	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	27 unit	20.300.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Makassar	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	27 unit	20.300.000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Makassar	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan	12 bulan	934.535.975	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Makassar	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan	12 bulan	934.535.975	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Makassar	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	2 orang	28.184.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Makassar	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	2 orang	28.184.000	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Makassar	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang disediakan	93 unit	25.000.000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Makassar	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang disediakan	93 unit	25.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 jenis	10.750.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Makassar	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 jenis	10.750.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 jenis	36.328.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Makassar	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 jenis	36.328.900	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Makassar	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3 jenis	16.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Makassar	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3 jenis	16.500.000	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Makassar	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang disediakan	40 kegiatan	499.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Makassar	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang disediakan	40 kegiatan	499.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Makassar	Jumlah Mobil Jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	1 unit	40.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Makassar	Jumlah Mobil Jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	1 unit	40.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	28 unit	244.177.500	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	28 unit	244.177.500	

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Makassar	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	23 Unit	9.750.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Makassar	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	23 Unit	9.750.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	2 Jenis	10.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Makassar	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	2 Jenis	10.000.000
	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Makassar	Jumlah kebutuhan pengadaan pakaian kerja dan peningkatan kapasitas SDM	3 Jenis	1.457.867.275	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Makassar	Jumlah kebutuhan pengadaan pakaian kerja dan peningkatan kapasitas SDM	3 Jenis	1.457.867.275
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Makassar	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	68 orang	34.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Makassar	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	68 orang	34.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Makassar	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan	1000 orang	1.423.867.275	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Makassar	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan	1000 orang	1.423.867.275
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Makassar	PERSENTASE JUMLAH KONFLIK UMAT BERAGAMA / ANTAR UMAT BERAGAMA, SUKU DAN ETNIS YANG TERTANGANI	90%	610.000.000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Makassar	PERSENTASE JUMLAH KONFLIK UMAT BERAGAMA / ANTAR UMAT BERAGAMA, SUKU DAN ETNIS YANG TERTANGANI	90%	610.000.000
		Makassar	PERSENTASE PENURUNAN JUMLAH KONFLIK UMAT BERAGAMA / ANTAR UMAT BERAGAMA, SUKU DAN ETNIS YANG TERJADI	10%			Makassar	PERSENTASE PENURUNAN JUMLAH KONFLIK UMAT BERAGAMA / ANTAR UMAT BERAGAMA, SUKU DAN ETNIS YANG TERJADI	10%	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Makassar	Jumlah Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dirumuskan	4 Kebijakan	610.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Makassar	Jumlah Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dirumuskan	4 Kebijakan	610.000.000

	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Makassar	Jumlah Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	1 Program	445.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Makassar	Jumlah Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	1 Program	445.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Makassar	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dirumuskan	1 Kebijakan	45.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Makassar	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dirumuskan	1 Kebijakan	45.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Makassar	Jumlah Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	1 Kali Koordinasi	40.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Makassar	Jumlah Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	1 Kali Koordinasi	40.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Makassar	Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	2 Kali Monitoring	40.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Makassar	Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	2 Kali Monitoring	40.000.000	
	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan	Makassar	Jumlah Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan yang	5 Fungsi	40.000.000	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan	Makassar	Jumlah Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan yang	5 Fungsi	40.000.000	

			dilaksanakan				dilaksanakan			
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Makassar	PERSENTASE PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	70%	1.515.892.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Makassar	PERSENTASE PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	70%	1.515.892.000
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Makassar	Jumlah Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dirumuskan	4 Kebijakan	1.515.892.000	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Makassar	Jumlah Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dirumuskan	4 Kebijakan	1.515.892.000

Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Makassar	Jumlah Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	1 Program	50.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Makassar	Jumlah Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	1 Program	50.000.000	
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Makassar	Jumlah Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah yang disusun	1 Bahan Perumusan	50.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Makassar	Jumlah Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah yang disusun	1 Bahan Perumusan	50.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Makassar	Jumlah Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta	1 Kebijakan	50.000.000	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Makassar	Jumlah Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta	1 Kebijakan	50.000.000	

	Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Pemantauan Situasi Politik Di Daerah yang dilaksanakan			Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Pemantauan Situasi Politik Di Daerah yang dilaksanakan			
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Makassar	Jumlah Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dilaksanakan	2 Koordinasi	1.265.892.000	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Makassar	Jumlah Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dilaksanakan	2 Koordinasi	1.265.892.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Makassar	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang dilaksanakan	2 Kali Monitoring	50.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Makassar	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang dilaksanakan	2 Kali Monitoring	50.000.000	

	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan	Makassar	Jumlah Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan yang dilaksanakan	5 Fungsi	50.000.000	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan	Makassar	Jumlah Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan yang dilaksanakan	5 Fungsi	50.000.000	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Makassar	PERSENTASE ORGANISASI KEMASYARAKATAN/POLITIK MITRA YANG AKTIF, TERDAFTAR, TERAWASI DAN TELAH MENDAPATKAN PEMBINAAN DALAM PENGUATAN KESATUAN BANGSA	70%	200.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Makassar	PERSENTASE ORGANISASI KEMASYARAKATAN/POLITIK MITRA YANG AKTIF, TERDAFTAR, TERAWASI DAN TELAH MENDAPATKAN PEMBINAAN DALAM PENGUATAN KESATUAN BANGSA	70%	200.000.000	
		Makassar	JUMLAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN/POLITIK MITRA YANG AKTIF, TERDAFTAR DAN TERAWASI KEBERADAANNYA	200 ORMAS			Makassar	JUMLAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN/POLITIK MITRA YANG AKTIF, TERDAFTAR DAN TERAWASI KEBERADAANNYA	200 ORMAS		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Makassar	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dirumuskan	4 Kebijakan	200.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Makassar	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dirumuskan	4 Kebijakan	200.000.000	
	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Makassar	Jumlah Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun	1 Program	40.000.000	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Makassar	Jumlah Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun	1 Program	40.000.000	

	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Makassar	Jumlah Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun	1 Bahan Perumusan	40.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Makassar	Jumlah Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun	1 Bahan Perumusan	40.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Makassar	Jumlah Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang dilaksanakan	1 Kebijakan	40.000.000	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Makassar	Jumlah Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang dilaksanakan	1 Kebijakan	40.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Makassar	Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang dilaksanakan	2 Kali Monitoring	40.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Makassar	Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang dilaksanakan	2 Kali Monitoring	40.000.000	
	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan	Makassar	Jumlah Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan yang dilaksanakan	5 Fungsi	40.000.000	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan	Makassar	Jumlah Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan yang dilaksanakan	5 Fungsi	40.000.000	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Makassar	MENEKAN PERSENTASE PENGGUNA NARKOTIKA 1,6%	2%	240.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Makassar	MENEKAN PERSENTASE PENGGUNA NARKOTIKA 1,6%	2%	240.000.000	

Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Makassar	Jumlah Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang dirumuskan	4 Kebijakan	240.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Makassar	Jumlah Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang dirumuskan	4 Kebijakan	240.000.000
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Makassar	Jumlah Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	1 Program	40.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Makassar	Jumlah Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	1 Program	40.000.000
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Makassar	Jumlah Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	1 Bahan Perumusan	40.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Makassar	Jumlah Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	1 Bahan Perumusan	40.000.000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Makassar	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	1 Kebijakan	40.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Makassar	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	1 Kebijakan	40.000.000

	Kepercayaan di Daerah					Kepercayaan di Daerah					
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Makassar	Jumlah Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	2 Kali Koordinasi	40.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Makassar	Jumlah Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	2 Kali Koordinasi	40.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Makassar	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	2 Kali Monitoring	40.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Makassar	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	2 Kali Monitoring	40.000.000	
	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan Oleh Pimpinan	Makassar	Jumlah Fungsi Lain yang diberikan Oleh Pimpinan yang dilaksanakan	5 Fungsi	40.000.000	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan Oleh Pimpinan	Makassar	Jumlah Fungsi Lain yang diberikan Oleh Pimpinan yang dilaksanakan	5 Fungsi	40.000.000	

6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Makassar	PERSENTASE JUMLAH KONFLIK DAN GANGGUAN KEAMANAN HORIZONTAL YANG TERTANGANI	90%	200.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Makassar	PERSENTASE JUMLAH KONFLIK DAN GANGGUAN KEAMANAN HORIZONTAL YANG TERTANGANI	90%	200.000.000	
		Makassar	PERSENTASE PENURUNAN JUMLAH KONFLIK DAN GANGGUAN KEAMANAN HORIZONTAL YANG TERJADI	10%			Makassar	PERSENTASE PENURUNAN JUMLAH KONFLIK DAN GANGGUAN KEAMANAN HORIZONTAL YANG TERJADI	10%		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Makassar	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dirumuskan	4 Kebijakan	200.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Makassar	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dirumuskan	4 Kebijakan	200.000.000	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Makassar	Jumlah Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun	1 Program	40.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Makassar	Jumlah Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun	1 Program	40.000.000	

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Makassar	Jumlah Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun	1 Bahan Perumusan	40.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Makassar	Jumlah Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun	1 Bahan Perumusan	40.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Makassar	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang dilaksanakan	1 Kebijakan	40.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Makassar	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang dilaksanakan	1 Kebijakan	40.000.000	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Makassar	Jumlah Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	2 Kali Koordinasi	40.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Makassar	Jumlah Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	2 Kali Koordinasi	40.000.000	

	Penanganan Konflik di Daerah		Daerah yang dilaksanakan			Penanganan Konflik di Daerah		Daerah yang dilaksanakan			
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Makassar	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang dilaksanakan	2 Kali Monitoring	40.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Makassar	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang dilaksanakan	2 Kali Monitoring	40.000.000	

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Secara umum, usulan program dan kegiatan dalam Renja tidak berbeda dengan rancangan awal RKPD dan tidak ada usulan program dan kegiatan dalam Renja yang berbeda dengan rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Tabel T-C.32

Program Dan Kegiatan Yang Diakomodir Dalam Rancangan RKPD Pemerintah Kota Makassar Tahun 2021

LAMPIRAN: BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (STATUS: Approved)

NOMOR : TANGGAL :

NO	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB	DESKRIPSI USULAN	VOLUME	LOKASI USULAN	PENGUSUL	LOKASI DISETUJUI	KETERANGAN
1	Program pencegahan penyalahgunaan narkoba	Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Masyarakat Lorong	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyuluhan Bahaya Narkoba bagi Kelompok Karang Taruna (ID: #7211)	4 Kegiatan	kelurahan barana	kel. barana, kec. makassar	kelurahan barana	
2	Program pencegahan penyalahgunaan narkoba	Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Masyarakat Lorong	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bahaya narkoba bagi masyarakat kelurahan maccini (ID: #7264)	50 Orang	jl. urip sumoharjo no. 10 makassar	kel. maccini, kec. makassar	jl. urip sumoharjo no. 10 makassar	
3	Program pencegahan penyalahgunaan narkoba	Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Masyarakat Lorong	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Masyarakat Lorong (ID: #6985)	20 Orang	jl. maccini kidul	kel. maccini gusung, kec. makassar	jl. maccini kidul	
4	Program pencegahan penyalahgunaan narkoba	Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Masyarakat Lorong	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sosialisasi bahaya narkoba dan HIV/AIDS (ID: #7164)	50 Orang	jalan kesatuan iii no. 17 (kelurahan maccini parang kecamatan makassar kota	kel. maccini parang, kec. makassar	jalan kesatuan iii no. 17 (kelurahan maccini parang kecamatan makassar kota	

						makassar)		makassar)	
5	Program pencegahan penyalahgunaan narkotika	Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Masyarakat Lorong	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PENYULUHAN BAHAYA NARKOBA (ID: #6923)	1 Kelurahan	jl. nuri baru	kel. tamarunang, kec. mariso	jl. nuri baru	
6	Program pencegahan penyalahgunaan narkotika	Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Masyarakat Lorong	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PENYULUHAN BAHAYA NARKOBA BAGI GENERASI MUDA 2 KALI PERTAHUN (ID: #6930)	2 Tahun	jl. hati murni rw 02	kel. tamarunang, kec. mariso	jl. hati murni rw 02	
7	Program pencegahan penyalahgunaan narkotika	Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Masyarakat Lorong	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sosialisasi tentang Narkoba (ID: #12622)	50 Orang	rw.02 #kel.lembo #kec.tallo	kel. lembo, kec. tallo	rw.02 #kel.lembo #kec.tallo	
8	Program pencegahan penyalahgunaan narkotika	Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Masyarakat Lorong	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sosialisasi Penyalagunaan Narkoba di RW.001 (ID: #11740)	100 Orang	jl. tinumbu lr. 165.b rw.001	kel. pannampu, kec. tallo	jl. tinumbu lr. 165.b rw.001	
9	Program pencegahan penyalahgunaan narkotika	Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Masyarakat Lorong	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sosialisasi Penyalagunaan Narkoba di RW.002 (ID: #11741)	100 Orang	jl. tinumbu lr.166.b no.1 rw.002	kel. pannampu, kec. tallo	jl. tinumbu lr.166.b no.1 rw.002	
10	Program pencegahan penyalahgunaan narkotika	Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Masyarakat Lorong	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sosialisasi Penyalagunaan Narkoba di RW.003 (ID: #11743)	100 Orang	jl. sabutung baru rw.003	kel. pannampu, kec. tallo	jl. sabutung baru rw.003	
11	Program pencegahan penyalahgunaan narkotika	Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Masyarakat Lorong	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sosialisasi Penyalagunaan Narkoba di RW.004 (ID: #11745)	100 Orang	jl. bersih raya no.16	kel. pannampu, kec. tallo	jl. bersih raya no.16	

12	Program pencegahan penyalahgunaan narkotika	Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Masyarakat Lorong	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sosialisasi dan Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi masyarakat di RW.005 (ID: #11746)	100 Orang	jl. indah 4 no. 26 rw.005	kel. pannampu, kec. tallo	jl. indah 4 no. 26 rw.005	
13	Program pencegahan penyalahgunaan narkotika	Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Masyarakat Lorong	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sosialisasi Penyalagunaan Narkoba di RW.006 (ID: #11748)	100 Orang	jl. kesempatan raya rw.006	kel. pannampu, kec. tallo	jl. kesempatan raya rw.006	
14	Program pencegahan penyalahgunaan narkotika	Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Masyarakat Lorong	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SOSIALISASI BAHAYA NARKOBA DI RT 06 RW 04 (ID: #12594)	2 Komunitas	jalan muhammad jufri lorong 3	kel. rappojawa, kec. tallo	jalan muhammad jufri lorong 3	
15	Program pencegahan penyalahgunaan narkotika	Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Masyarakat Lorong	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PENCEGAHAN DINI TENTANG BAHAYA NARKOBA (ID: #11342)	100 Orang	jalan sultan alauddin no. 134, kelurahan mangasa, kecamatan tamalate	kel. mangasa, kec. tamalate	jalan sultan alauddin no. 134, kelurahan mangasa, kecamatan tamalate	
16	Program pencegahan penyalahgunaan narkotika	Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Masyarakat Lorong	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sosialisasi Bahaya Narkoba (ID: #12214)	50 Orang	jl.gunung merapi rt.04 rw.01	kel. pisang selatan, kec. ujung pandang	jl.gunung merapi rt.04 rw.01	
17	Program pencegahan penyalahgunaan narkotika	Penyuluhan Bahaya Narkoba	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sosialisasi Narkoba dan Nafish Bagi Remaja (ID: #7069)	50 Orang	jalan kerung-kerung (kantor lurah maradekaya utara), rt 013/ rw 04	kel. maradekaya utara, kec. makassar	jalan kerung-kerung (kantor lurah maradekaya utara), rt 013/ rw 04	
18	Program pencegahan penyalahgunaan narkotika	Penyuluhan Bahaya Narkoba	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembinaan Kepemudaan Terkait Masalah Narkoba (ID: #9213)	60 Orang	jl. dahlia lr. 312 rw.001 rt.002	kel. bontorannu, kec. mariso	jl. dahlia lr. 312 rw.001 rt.002	

19	Program pencegahan penyalahgunaan narkotika	Penyuluhan Bahaya Narkoba	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sosialisasi Bahaya Narkoba (ID: #9253)	50 Orang	jl. dahlia lr. 312 rw.001	kel. bontorannu, kec. mariso	jl. dahlia lr. 312 rw.001	
20	Program pencegahan penyalahgunaan narkotika	Penyuluhan Bahaya Narkoba	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sosialisasi Bahaya Narkoba (2 Angkatan) (ID: #9593)	1 Kelurahan	jl. nuri baru rw.005	kel. bontorannu, kec. mariso	jl. nuri baru rw.005	
21	Program pencegahan penyalahgunaan narkotika	Penyuluhan Bahaya Narkoba	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi masyarakat. (ID: #12873)	50 Orang	jl. rappokalling raya 1 rt.01 s/d rt.05/rw.05	kel. tammua, kec. tallo	jl. rappokalling raya 1 rt.01 s/d rt.05/rw.05	
22	Program pencegahan penyalahgunaan narkotika	Penyuluhan Bahaya Narkoba	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyuluhan bahaya narkoba kepada masyarakat (ID: #10915)	50 Orang	btn tabaria blok d	kel. mannuruki, kec. tamalate	btn tabaria blok d	
23	Program pencegahan penyalahgunaan narkotika	Penyuluhan Bahaya Narkoba	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Memberikan pencerahan kepada masyarakat khususnya pemuda/pemudi betapa bahayanya menggunakan NARKOBA. (ID: #14065)	100 Orang	kel. maccini sombala	kel. maccini sombala, kec. tamalate	kel. maccini sombala	
24	Program pencegahan penyalahgunaan narkotika	Penyuluhan Bahaya Narkoba	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba/HIV (ID: #7800)	10 Orang	jl. kalimantan komp. pu	kel. ujung tanah, kec. ujung tanah	jl. kalimantan komp. pu	
25	Program pencegahan penyalahgunaan narkotika	Penyuluhan Bahaya Narkoba	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba/HIV di RW. 002 (ID: #8502)	10 Orang	jl. sanani rw. 002	kel. ujung tanah, kec. ujung tanah	jl. sanani rw. 002	
26	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial	Sosialisasi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan (ID: #10920)	50 Orang	btn tabaria blok d	kel. mannuruki, kec. tamalate	btn tabaria blok d	

27	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial	Sosialisasi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Agar masyarakat merasa nyaman dan tentram (ID: #14063)	100 Orang	se-kelurahan maccini sombala	kel. maccini sombala, kec. tamalate	se-kelurahan maccini sombala	
28	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial	Sosialisasi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat RW. 001 (ID: #7803)	15 Orang	jl. kalimantan komp pu	kel. ujung tanah, kec. ujung tanah	jl. kalimantan komp pu	
29	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial	Sosialisasi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Lingkungan RW. 002 (ID: #8504)	15 Orang	jl. sanani rw. 002	kel. ujung tanah, kec. ujung tanah	jl. sanani rw. 002	
30	Program pendidikan politik masyarakat	Sosialisasi pendidikan politik penguatan kesatuan bangsa bagi organisasi politik, organisasi Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PENYULUHAN HUKUM TENTANG KEHIDUPAN BERPOLITIK (ID: #6922)	1 Tahun	jl. baji minasa ii rt 01,02,03 rw 03	kel. tamarunang, kec. mariso	jl. baji minasa ii rt 01,02,03 rw 03	
31	Program pendidikan politik masyarakat	Sosialisasi pendidikan politik penguatan kesatuan bangsa bagi organisasi politik, organisasi Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelatihan Remaja Karang Taruna untuk Meningkatkan dan Melatih Kemampuan Dalam Berinteraksi dan Berorganisasi dalam Lingkungan Masyarakat (ID: #7703)	10 Orang	jl. kalimantan no. 105 (kantor kelurahan ujung tanah)	kel. ujung tanah, kec. ujung tanah	jl. kalimantan no. 105 (kantor kelurahan ujung tanah)	

32	Program pendidikan politik masyarakat	Sosialisasi pendidikan politik penguatan kesatuan bangsa bagi organisasi politik, organisasi Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pelatihan Remaja Karang Taruna untuk Meningkatkan dan Melatih Kemampuan Dalam Berinteraksi dan Berorganisasi dalam Lingkungan Masyarakat di lingkungan RW. 002 (ID: #8470)	10 Orang	jl sanani rw. 002	kel. ujung tanah, kec. ujung tanah	jl sanani rw. 002	
33	Program pendidikan politik masyarakat	Sosialisasi pendidikan politik bagi tokoh masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peningkatan SDM Aparat Melalui Pelatihan RT/RW (ID: #7533)	4 Orang	jl. kalimantan komp pu rw. 001	kel. ujung tanah, kec. ujung tanah	jl. kalimantan komp pu rw. 001	
34	Program pendidikan politik masyarakat	Sosialisasi pendidikan politik bagi tokoh masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peningkatan SDM Aparat Berupa Pelatihan RT/RW (ID: #8381)	3 Orang	jl. sanani rw. 002	kel. ujung tanah, kec. ujung tanah	jl. sanani rw. 002	
35	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Forum dialog peningkatan peran tokoh agama dalam memperkuat kerukunan hidup umat beragama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Agar terciptanya saling menghargai dan menghormati antar agama. (ID: #14067)	100 Orang	kel. maccini sombala	kel. maccini sombala, kec. tamalate	kel. maccini sombala	

Pada Tahun 2021 ada beberapa usulan yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Makassar, melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tahun 2019.

Sehubungan hal tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar menerima usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tahun 2021, dan mengakomodir melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Politik Masyarakat

a. Sosialisasi pendidikan politik penguatan kesatuan bangsa bagi organisasi politik, organisasi masyarakat dan lsm dengan usulan peserta dari :

- Jl. Baji minasa ii rt 01,02,03 rw 03
- Jl. Kalimantan no. 105 (kantor kelurahan ujung tanah)
- Jl sanani rw. 002

b. Sosialisasi pendidikan politik bagi tokoh masyarakat

- Jl. Kalimantan komp pu rw. 001
- Jl. Sanani rw. 002

2. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan sosial

a. Sosialisasi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan usulan peserta dari :

- Btn tabaria blok d
- Se-kelurahan maccini sombala
- Jl. Kalimantan komp pu
- Jl. Sanani rw. 002

3. Program pengembangan wawasan kebangsaan

a. Forum dialog peningkatan peran tokoh agama dalam memperkuat kerukunan hidup umat beragama

- Kel. Maccini sombala

4. Program pencegahan penyalahgunaan narkotika

a. Penuluhan bahaya narkoba, dengan usulan peserta dari :

- Jalan kerung-kerung (kantor lurah maradekaya utara), rt 013/ rw 04
- Jl. Dahlia lr. 312 rw.001 rt.002
- Jl. Dahlia lr. 312 rw.001
- Jl. Nuri baru rw.005
- Jln. Rappokalling raya 1 rt.01 s/d rt.05/rw.05
- Btn tabaria blok d
- Kel. Maccini sombala
- Jl. Kalimantan komp. Pu
- Jl. Sanani rw. 002

b. Penyuluhan bahaya narkoba bagi masyarakat lorong

- Kelurahan barana
- Jl. Urip sumoharjo no. 10 makassar
- Jl. Maccini kidul
- Jalan kesatuan iii no. 17 (kelurahan maccini parang kecamatan makassar kota makassar)
- Jl. Nuri baru
- Jl. Hati murni rw 02
- Rw.02 kel.lembo, kec.tallo
- Jl. Tinumbu lr. 165.b rw.001
- Jl. Tinumbu lr.166.b no.1 rw.002
- Jl. Sabutung baru rw.003
- Jl. Bersih raya no.16
- Jl. Indah 4 no. 26 rw.005
- Jl. Kesempatan raya rw.006
- Jalan muhammad jufri lorong 3
- Jalan sultan alauddin no. 134, kelurahan mangasa, kecamatan tamalate
- Jl.gunung merapi rt.04 rw.01

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Perencanaan pembangunan pada program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri merupakan bagian dari arah kebijakan dalam Konteks Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang dirumuskan dalam tiga pilar pokok yaitu :

1. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik;
2. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi dan menjaga stabilitas sistem politik dalam negeri dan sistem pemerintahan dalam negeri; serta
3. Meningkatkan kapasitas pembangunan daerah dan keberdayaan masyarakat.

Melalui tiga pilar tersebut, dirumuskan kebijakan yang diarahkan untuk mendukung upaya pencapaian misi Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014, yaitu mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai, Adil dan Demokratis, serta Sejahtera. Berdasarkan arah kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri, diharapkan fungsi-fungsi pemerintahan dalam semua strata dapat dilaksanakan dengan baik. Mantapnya penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang didukung oleh stabilitas politik dalam negeri tersebut menjadi landasan utama bagi upaya peningkatan peran pemerintahan yang lebih responsif terhadap perbaikan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten/Kota Makassar

No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Nasional		
1	Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik	Dirjen Kesbangpol Dalam Negeri	
2	Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi dan menjaga	Dirjen Kesbangpol Dalam Negeri	

	stabilitas sistem politik dalam negeri dan sistem pemerintahan dalam negeri		
3	Meningkatkan kapasitas pembangunan daerah dan keberdayaan masyarakat	Dirjen Kesbangpol Dalam Negeri	
B	Provinsi		
1	Akselerasi pencapaian target-target pemantapan kehidupan beragama yang tertinggal	RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018	
2	Akselerasi target-target pencapaian demokrasi yang tertinggal	RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018	
3	Akselerasi pemeliharaan ketertiban dan pencapaian demokrasi	RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018	
4	Penguatan wawasan kebangsaan dan pilar NKRI	RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018	

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan penyusunan Rencana Kerja yaitu untuk merumuskan, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Adapun tujuan dan sasarannya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, berbudaya dan religius
- b. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan damai
- c. Mewujudkan masyarakat yang paham tentang wawasan kebangsaan
- d. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi

2. Sasaran

- a. Terwujudnya masyarakat yang religius dan berakhlak mulia serta memiliki toleransi antar umat beragama.
- b. Meningkatnya ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan
- c. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan

- d. Terlaksananya administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif serta dapat diakses public

3.3. Program dan Kegiatan

Misi Pemerintah Kota Makassar yaitu Merekonstruksi wujud kedaulatan rakyat secara sosial, budaya, politik dan ekonomi secara martabat, merata dan berkeadilan, dengan fokus pada :

- a. Bebas pengangguran, kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan inovasi pengembangan cakupan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat
- c. Pembangunan lingkungan dan pemukiman layak huni
- d. Jaminan sosial keluarga serbaguna (jam surga) untuk semua
- e. Pelayanan kesehatan darurat gratis kerumah 24 jam
- f. Deposito pendidikan gratis semua bisa sekolah
- g. Sampah kita DIA tukar beras
- h. Training keterampilan gratis dan dana bergulir tanpa agunan
- i. Rumah kota murah untuk rakyat kecil
- j. Hidup hijau dengan kebun kota

Dalam pelaksanaan misi merekonstruksi wujud kedaulatan rakyat secara sosial, budaya dan politik, ekonomi secara bermartabat, merata dan berkeadilan ini, perlu dukungan aparatur pemerintahan beserta masyarakat, sebaliknya tanpa dukungan dan kerjasama aparatur bersama masyarakat, maka misi ini tidak dapat berjalan sesuai visi yang di harapkan.

Sedangkan Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar yang mengacu kepada Kebijakan Pemerintah Kota Makassar, yaitu pembangunan kualitas manusia berdasarkan pada potensi sumber daya manusia yang ada. Hal ini menjadi tantangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar dalam pembangunan manusia yang berkualitas, berbudaya dan bertoleransi sehingga dapat menumbuhkan daya saing ekonomi daerah, pengembangan kawasan tata ruang dan lingkungan.

Dari segi internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar juga tertantang untuk memberikan pelayanan politik yang diperlukan oleh masyarakat Kota Makassar

yang mutlak didukung oleh lembaga dan aparatur profesional yaitu melalui sosialisasi, penyuluhan bimtek dan seminar pemahaman kepada masyarakat dan melakukan koordinasi dengan masyarakat, lembaga/instansi pemerintah lainnya serta memberdayakan masyarakat dalam upaya membantu memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat lainnya.

Untuk tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar mengusulkan sebanyak **Lima program** dan **tujuh puluh dua kegiatan** yang terbagi sebagai berikut :

1. Program Utama sebanyak 5 (lima) program terdiri dari Kegiatan utama sebanyak 5 (lima) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan
2. Program pendukung sebanyak 1 (satu) program terdiri dari Kegiatan pendukung sebanyak 4 (empat) kegiatan dan sub kegiatan sebanyak 19 sub kegiatan

Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Program Utama yaitu :

1) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

- a) Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 4. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan

2) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

- a) Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
 3. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
 4. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 6. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan

3) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - 1. Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - 2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - 3. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - 4. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - 5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan

4) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

- a) Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
 - 1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - 3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
6. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan Oleh Pimpinan

5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

- a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

b. Program Pendukung yaitu :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
 2. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
- b) Administrasi Keuangan
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 4. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
- c) Administrasi Umum
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- d) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 2. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Adapun rencana anggaran tahun 2021 sebesar **Rp 10.374.916.900,- (Sepuluh Milyard Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah)**, sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel T-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar**

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2021			LOKASI	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022			PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB	KE T	
KODE ORGANISASI	FUNG SI / SUB FUNG SI	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN				TARGET INDIKAT OR	KEBUTUHA N DANA / PAGU INDIKATIF	SUMB ER DANA		TARGET INDIKAT OR	KEBUTUHA N DANA / PAGU INDIKATIF	SUMB ER DANA			LOKASI
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8 - 1	0 - 0	0 - 0	0 1												
				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
8 - 1	0 - 0	0 - 0	0 1	2											
				KETERTIBAN DAN KEAMANAN											
8 - 1	0 - 0	0 - 0	0 1	2	0 1										
				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
8 - 1	0 - 0	0 - 0	0 1	2	0 1	8									
				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8 - 1	0 - 0	0 - 0	0 1	2	0 1	8	0 1								
				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
						10.374.916. 900				11.412.408. 590					
8 - 1	0 - 0	0 - 0	0 1	2	0 1	8	0 1	0 1							
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	90%	7.609.024.9 00	APBD	Makass ar	90%	8.369.927.3 90	APBD	Makass ar	Badan Kesbangpol	
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%		APBD	Makass ar	90%		APBD	Makass ar	Badan Kesbangpol	

1	0	0										yang tersedia		75				13			
8 - 1	0 - 0	0 - 0	0 1	2	0 1	8	0 1	0 1	2.0 3	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat dan ekspedisi yang disediakan	6 orang	36.000.000	APBD	Makassar	6 orang	39.600.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
8 - 1	0 - 0	0 - 0	0 1	2	0 1	8	0 1	0 1	2.0 3	0 6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	27 unit	20.300.000	APBD	Makassar	27 unit	22.330.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
8 - 1	0 - 0	0 - 0	0 1	2	0 1	8	0 1	0 1	2.0 3	0 7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan	12 bulan	934.535.975	APBD	Makassar	12 bulan	1.027.989.573	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
8 - 1	0 - 0	0 - 0	0 1	2	0 1	8	0 1	0 1	2.0 3	0 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	2 orang	28.184.000	APBD	Makassar	2 orang	31.002.400	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
8 - 1	0 - 0	0 - 0	0 1	2	0 1	8	0 1	0 1	2.0 3	0 9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang disediakan	1 Paket	25.000.000	APBD	Makassar	93 unit	27.500.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
8 - 1	0 - 0	0 - 0	0 1	2	0 1	8	0 1	0 1	2.0 3	1 2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 jenis	10.750.000	APBD	Makassar	2 jenis	11.825.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
8 - 1	0 - 0	0 - 0	0 1	2	0 1	8	0 1	0 1	2.0 3	1 3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 jenis	36.328.900	APBD	Makassar	5 jenis	39.961.790	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
8 - 1	0 - 0	0 - 0	0 1	2	0 1	8	0 1	0 1	2.0 3	1 5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3 jenis	16.500.000	APBD	Makassar	3 jenis	18.150.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
8 - 1	0 - 0	0 - 0	0 1	2	0 1	8	0 1	0 1	2.0 3	1 8	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang disediakan	40 kegiatan	499.000.000	APBD	Makassar	40 kegiatan	548.900.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
8 - 1	0 - 0	0 - 0	0 1	2	0 1	8	0 1	0 1	2.0 3	2 9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	1 unit	40.000.000	APBD	Makassar	1 unit	44.000.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol

8 -	0 -	0 -	0 1	2 0	1 8	0 1	0 1	2.0 3	3 0	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	28 unit	244.177.500	APBD	Makassar	28 unit	268.595.250	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
8 -	0 -	0 -	0 1	2 0	1 8	0 1	0 1	2.0 3	3 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	23 Unit	9.750.000	APBD	Makassar	23 Unit	10.725.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
8 -	0 -	0 -	0 1	2 0	1 8	0 1	0 1	2.0 3	3 4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	2 Jenis	10.000.000	APBD	Makassar	2 Jenis	11.000.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
8 -	0 -	0 -	0 1	2 0	1 8	0 1	0 1	2.0 4		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah kebutuhan pengadaan pakaian kerja dan peningkatan kapasitas SDM	3 Jenis	1.457.867.275	APBD	Makassar	3 Jenis	1.603.654.003	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
8 -	0 -	0 -	0 1	2 0	1 8	0 1	0 1	2.0 4	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	68 orang	34.000.000	APBD	Makassar	68 orang	37.400.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
8 -	0 -	0 -	0 1	2 0	1 8	0 1	0 1	2.0 4	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan	1000 orang	1.423.867.275	APBD	Makassar	1000 orang	1.566.254.003	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
8 -	0 -	0 -	0 1	2 0	1 8	0 1	0 2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PERSENTASE JUMLAH KONFLIK UMAT BERAGAMA / ANTAR UMAT BERAGAMA, SUKU DAN ETNIS YANG TERTANGANI	90%	610.000.000	APBD	Makassar	90%	671.000.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
											PERSENTASE PENURUNAN JUMLAH KONFLIK UMAT BERAGAMA / ANTAR UMAT BERAGAMA, SUKU DAN ETNIS YANG TERJADI	10%		APBD	Makassar	10%		APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
8 -	0 -	0 -	0 1	2 0	1 8	0 1	0 2	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter	Jumlah Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4 Kebijakan	610.000.000	APBD	Makassar	4 Kebijakan	671.000.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol

												Kebangsaan	yang dirumuskan								
8 - 1	0 - 0	0 - 0	0 1	2	0 1	8	0 1	0 2	2.0 1	0 1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	1 Program	445.000.000	APBD	Makassar	1 Program	489.500.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
8 - 1	0 - 0	0 - 0	0 1	2	0 1	8	0 1	0 2	2.0 1	0 2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dirumuskan	1 Kebijakan	45.000.000	APBD	Makassar	1 Kebijakan	49.500.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
8 - 1	0 - 0	0 - 0	0 1	2	0 1	8	0 1	0 2	2.0 1	0 3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	1 Koordina si	40.000.000	APBD	Makassar	1 Koordina si	44.000.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
8 - 1	0 - 0	0 - 0	0 1	2	0 1	8	0 1	0 2	2.0 1	0 4	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	2 Kali Monitori ng	40.000.000	APBD	Makassar	2 Kali Monitori ng	44.000.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
8 - 1	0 - 0	0 - 0	0 1	2	0 1	8	0 1	0 2	2.0 1	0 5	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan	Jumlah Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan yang dilaksanakan	5 Fungsi	40.000.000	APBD	Makassar	5 Fungsi	44.000.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol

8	0	0	0	2	0	8	0	0			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	70%	1.515.892.000	APBD	Makassar	70%	1.667.481.200	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol	
8	0	0	0	2	0	8	0	0	2.0		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dirumuskan	4 Kebijakan	1.515.892.000	APBD	Makassar	4 Kebijakan	1.667.481.200	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol	
8	0	0	0	2	0	8	0	0	2.0	0	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	Jumlah Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	1 Program	50.000.000	APBD	Makassar	1 Program	55.000.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol	

											Politik di Daerah										
8	0	0	0	2	0	8	0	0	2.0	0	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah yang disusun	1 Bahan Perumusan	50.000.000	APBD	Makassar	1 Bahan Perumusan	55.000.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
8	0	0	0	2	0	8	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah yang dilaksanakan	1 Kebijakan	50.000.000	APBD	Makassar	1 Kebijakan	55.000.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
8	0	0	0	2	0	8	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Jumlah Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan	2 Koordinasi	1.265.892.000	APBD	Makassar	2 Koordinasi	1.392.481.200	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol

											Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Situasi Politik di Daerah dilaksanakan										
8 -	0 -	0 -	0 0	1	2	0 1	8	0 1	0 3	2.0 1	0 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang dilaksanakan	2 Kali Monitoring	50.000.000	APBD	Makassar	2 Kali Monitoring	55.000.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
8 -	0 -	0 -	0 0	1	2	0 1	8	0 1	0 3	2.0 1	0 6	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan	Jumlah Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan yang dilaksanakan	5 Fungsi	50.000.000	APBD	Makassar	5 Fungsi	55.000.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
8 -	0 -	0 -	0 0	1	2	0 1	8	0 1	0 4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE ORGANISASI KEMASYARAKATAN/POLITIK MITRA YANG AKTIF, TERDAFTAR, TERAWASI DAN TELAH MENDAPATKAN PEMBINAAN DALAM PENGUATAN KESATUAN BANGSA	70%	200.000.000	APBD	Makassar	70%	220.000.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
													JUMLAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN/POLITIK MITRA YANG AKTIF, TERDAFTAR DAN TERAWASI KEBERADAANNYA	200 ORMAS		APBD	Makassar	200 ORMAS		APBD	Makassar	Badan Kesbangpol

8 -	0 -	0 -	0 1	2	0 1	8	0 1	0 4	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dirumuskan	4 Kebijaka n	200.000.000	APBD	Makassar	4 Kebijaka n	220.000.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol	
8 -	0 -	0 -	0 1	2	0 1	8	0 1	0 4	2.0 1	0 1	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun	1 Program	40.000.000	APBD	Makassar	1 Program	44.000.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol	
8 -	0 -	0 -	0 1	2	0 1	8	0 1	0 4	2.0 1	0 2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun	1 Bahan Perumus an	40.000.000	APBD	Makassar	1 Bahan Perumus an	44.000.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol	
8 -	0 -	0 -	0 1	2	0 1	8	0 1	0 4	2.0 1	0 3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang dilaksanakan	1 Kebijaka n	40.000.000	APBD	Makassar	1 Kebijaka n	44.000.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol	
8 -	0 -	0 -	0 1	2	0 1	8	0 1	0 4	2.0 1	0 4	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	2 Kali Monitori ng	40.000.000	APBD	Makassar	2 Kali Monitori ng	44.000.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol	

											Kepercayaan di Daerah	yang disusun									
8 -	0 -	0 -	0 1	2	0 1	8	0 1	0 5	2.0 1	0 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	1 Kebijakan	40.000.000	APBD	Makassar	1 Kebijakan	44.000.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
8 -	0 -	0 -	0 1	2	0 1	8	0 1	0 5	2.0 1	0 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	2 Kali Koordinasi	40.000.000	APBD	Makassar	2 Kali Koordinasi	44.000.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
8 -	0 -	0 -	0 1	2	0 1	8	0 1	0 5	2.0 1	0 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	2 Kali Monitoring	40.000.000	APBD	Makassar	2 Kali Monitoring	44.000.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
8 -	0 -	0 -	0 1	2	0 1	8	0 1	0 5	2.0 1	0 6	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan Oleh Pimpinan	Jumlah Fungsi Lain yang diberikan Oleh Pimpinan yang	5 Fungsi	40.000.000	APBD	Makassar	5 Fungsi	44.000.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol

8 -	0 -	0 -	0 1	2	0 1	8	0 1	0 6	2.0 1	0 2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun	1 Bahan Perumusan	40.000.000	APBD	Makassar	1 Bahan Perumusan	44.000.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
8 -	0 -	0 -	0 1	2	0 1	8	0 1	0 6	2.0 1	0 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang dilaksanakan	1 Kebijakan	40.000.000	APBD	Makassar	1 Kebijakan	44.000.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
8 -	0 -	0 -	0 1	2	0 1	8	0 1	0 6	2.0 1	0 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang dilaksanakan	2 Kali Koordinasi	40.000.000	APBD	Makassar	2 Kali Koordinasi	44.000.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol

8	0	0	0	2	0	8	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang dilaksanakan	2 Kali Monitoring	40.000.000	APBD	Makassar	2 Kali Monitoring	44.000.000	APBD	Makassar	Badan Kesbangpol
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------	------	----------	-------------------	------------	------	----------	------------------

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

KODE										URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
KODE ORGANISASI				FUNGSI / SUB FUNGSI		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN									
(1)				(2)		(3)				(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
8-1	0-0	0-0	01												
8-1	0-0	0-0	01	2											
8-1	0-0	0-0	01	2	01										
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8									
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01						10.374.916.900	APBD	
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indek kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	Makassar	90%	7.609.024.900	APBD
											Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Makassar	90%		APBD
											Persentase ketersediaan laporan keuangan dan	Makassar	100%		APBD

											laporan kinerja Perangkat Daerah					
											Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Makassar	90%		APBD	
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Makassar	5 Dokumen	112.500.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Makassar	2 dokumen	37.500.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah yang disusun	Makassar	2 dokumen	75.000.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	Makassar	5 Dokumen	4.128.131.250	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	Makassar	22 orang	3.301.128.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	Makassar	41 orang	714.503.250	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Makassar	2 dokumen	75.000.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	Makassar	2 dokumen	37.500.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	01	2.03		Administrasi Umum	Jumlah jasa adminitrasi umum yang tersedia	Makassar	5 jenis	1.910.526.375	APBD

8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat dan ekspedisi yang disediakan	Makassar	6 orang	36.000.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	Makassar	27 unit	20.300.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan	Makassar	12 bulan	934.535.975	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	Makassar	2 orang	28.184.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang disediakan	Makassar	93 unit	25.000.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Makassar	2 jenis	10.750.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Makassar	5 jenis	36.328.900	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Makassar	3 jenis	16.500.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang disediakan	Makassar	40 kegiatan	499.000.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	Makassar	1 unit	40.000.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan	Makassar	28 unit	244.177.500	APBD

													rutin/berkala					
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	Makassar	23 Unit	9.750.000	APBD		
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	Makassar	2 Jenis	10.000.000	APBD		
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah kebutuhan pengadaan pakaian kerja dan peningkatan kapasitas SDM	Makassar	3 Jenis	1.457.867.275	APBD		
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	Makassar	68 orang	34.000.000	APBD		
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang diadakan	Makassar	1000 orang	1.423.867.275	APBD		
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PERSENTASE JUMLAH KONFLIK UMAT BERAGAMA / ANTAR UMAT BERAGAMA, SUKU DAN ETNIS YANG TERTANGANI	Makassar	90%	610.000.000	APBD		
												PERSENTASE PENURUNAN JUMLAH KONFLIK UMAT BERAGAMA / ANTAR UMAT BERAGAMA, SUKU DAN ETNIS YANG TERJADI	Makassar	10%		APBD		

8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pematapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis dan pematapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dirumuskan	Makassar	4 Kebijakan	610.000.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	Makassar	1 Program	445.000.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dirumuskan	Makassar	1 Kebijakan	45.000.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	Makassar	1 Kali Koordinasi	40.000.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Makassar	2 Kali Monitoring	40.000.000	APBD

											Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan				
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan	Jumlah Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan yang dilaksanakan	Makassar	5 Fungsi	40.000.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK	Makassar	70%	1.515.892.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dirumuskan	Makassar	4 Kebijakan	1.515.892.000	APBD

8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	Makassar	1 Program	50.000.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	03	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah yang disusun	Makassar	1 Bahan Perumusan	50.000.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Jumlah Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Makassar	1 Kebijakan	50.000.000	APBD

											Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah yang dilaksanakan				
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dilaksanakan	Makassar	2 Koordinasi	1.265.892.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang dilaksanakan	Makassar	2 Kali Monitoring	50.000.000	APBD

8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	03	2.01	06	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan	Jumlah Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan yang dilaksanakan	Makassar	5 Fungsi	50.000.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE ORGANISASI KEMASYARAKATAN/POLITIK MITRA YANG AKTIF, TERDAFTAR, TERAWASI DAN TELAH MENDAPATKAN PEMBINAAN DALAM PENGUATAN KESATUAN BANGSA	Makassar	70%	200.000.000	APBD
												JUMLAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN/POLITIK MITRA YANG AKTIF, TERDAFTAR DAN TERAWASI KEBERADAANNYA	Makassar	200 ORMAS		APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dirumuskan	Makassar	4 Kebijakan	200.000.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun	Makassar	1 Program	40.000.000	APBD

8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	04	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun	Makassar	1 Bahan Perumusan	40.000.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang dilaksanakan	Makassar	1 Kebijakan	40.000.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang dilaksanakan	Makassar	2 Kali Monitoring	40.000.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan	Jumlah Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan yang dilaksanakan	Makassar	5 Fungsi	40.000.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	MENEKAN PERSENTASE PENGGUNA NARKOTIKA 1,6%	Makassar	2%	240.000.000	APBD

8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis Dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang dirumuskan	Makassar	4 Kebijakan	240.000.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	05	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	Makassar	1 Program	40.000.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	Makassar	1 Bahan Perumusan	40.000.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	Makassar	1 Kebijakan	40.000.000	APBD

8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	Makassar	2 Kali Koordinasi	40.000.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	Makassar	2 Kali Monitoring	40.000.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	05	2.01	06	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan Oleh Pimpinan	Jumlah Fungsi Lain yang diberikan Oleh Pimpinan yang dilaksanakan	Makassar	5 Fungsi	40.000.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE JUMLAH KONFLIK DAN GANGGUAN KEAMANAN HORIZONTAL YANG TERTANGANI	Makassar	90%	200.000.000	APBD
												PERSENTASE PENURUNAN JUMLAH KONFLIK DAN GANGGUAN KEAMANAN HORIZONTAL YANG TERJADI	Makassar	10%		APBD

8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dirumuskan	Makassar	4 Kebijakan	200.000.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun	Makassar	1 Program	40.000.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun	Makassar	1 Bahan Perumusan	40.000.000	APBD

8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang dilaksanakan	Makassar	1 Kebijakan	40.000.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang dilaksanakan	Makassar	2 Kali Koordinasi	40.000.000	APBD
8-1	0-0	0-0	01	2	01	8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi	Makassar	2 Kali Monitoring	40.000.000	

											Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang dilaksanakan				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, yang disusun dengan berpedoman pada kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Makassar Tahun 2014-2019 dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2014-2019, yang semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders di Kota Makassar dalam rangka mendukung pencapaian program dan kegiatan pembangunan Kota Makassar secara keseluruhan, oleh karena itu dibutuhkan komitmen pimpinan, beserta staf dan dukungan partisipasi masyarakat, dalam pengimplementasian rencana kerja ini, sehingga program dan kegiatan pembangunan di Kota Makassar dapat terlaksana dengan baik, dengan memfokuskan kepada :

1. Pentingnya mewujudkan sistem politik yang demokratis melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik yang berkualitas, demokratis, kuat dan efektif.
2. Pentingnya meningkatkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan melalui penurunan potensi konflik vertikal, horizontal, perang kelompok yang bernuansa SARA, terorisme dan konflik politik.
3. Pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, melalui pembinaan dan sosialisasi yang berkelanjutan.
4. Peningkatan kompetensi aparatur, melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan peningkatan SDM, sehingga menghasilkan aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi, khususnya dalam penyelenggaraan tugas-tugas teknis pemerintahan.

Demikian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2021 ini dibuat dengan harapan dapat diimplementasikan secara konsisten.

Makassar, Juli 2021
**Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Makassar**



Ir. H. JAMAING, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19601231 198003 1 064